



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MUARA ENIM

POLICY BRIEF

STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN MUARA ENIM :

PENDEKATAN BERBASIS ASET KOMUNITAS DAN KEBIJAKAN DAERAH

2025

LEMBAR PENGESAHAN

POLICY BRIEF

STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KEMISKINAN EKSTREM

DI KABUPATEN MUARA ENIM:

Pendekatan Berbasis Aset Komunitas dan Kebijakan Daerah

TIM TENAGA AHLI

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tandatangan
1.	Tini Apriani, S.Sos., M.Tr.AP 198104052008122001	Peneliti Ahli Muda (BRIN)	
2.	Dr. Imam Radianto Anwar Setia Putra, M.M 198302112008121001	Peneliti Ahli Muda (BRIN)	
3.	Suci Emilia Fitri, MPA 198705252014022002	Peneliti Ahli Muda (BRIN)	
4.	Rendy Pahrin Wadipalapa, S.Kom., M.A., Ph.D 198808012024031001	Peneliti Ahli Muda (BRIN)	

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MUARA ENIM

PANCA SURYA DIHARTA, S.H., M.H
NIP. 196803081993021001

POLICY BRIEF

STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN MUARA ENIM:

Pendekatan Berbasis Aset Komunitas dan Kebijakan Daerah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kabupaten Muara Enim menghadapi paradoks pembangunan yang memerlukan perhatian serius. Meskipun angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 12,32% pada tahun 2020 menjadi 9,79% pada tahun 2024, dengan jumlah penduduk miskin berkurang dari 79.270 jiwa menjadi 66.420 jiwa, indikator kualitas kemiskinan justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 1,66 menjadi 2,14, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan melonjak dari 0,32 menjadi 0,64. Data ini mengungkapkan bahwa masyarakat miskin yang tersisa tidak hanya sedikit jumlahnya, tetapi mengalami kondisi kemiskinan yang semakin dalam dan rentan.

Kajian mendalam terhadap 256 responden dari delapan desa di lima kecamatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi mengungkapkan akar permasalahan struktural. Program pengentasan kemiskinan yang berjalan masih sangat didominasi oleh bantuan konsumtif seperti PKH, BPNT, dan BLT, yang meskipun membantu pemenuhan kebutuhan dasar jangka pendek, tidak menyentuh akar permasalahan dan berpotensi menciptakan ketergantungan. Lebih dari 70% responden menyatakan bahwa bantuan yang diterima tidak signifikan dalam meningkatkan kondisi ekonomi mereka secara berkelanjutan.

Di sisi lain, temuan penting menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki beragam aset komunitas yang belum dioptimalkan. Mulai dari kelompok tani dan koperasi, jaringan sosial berbasis gotong royong, keterampilan agraris yang kuat, hingga lembaga lokal seperti masjid dan sekolah yang dapat berfungsi sebagai pusat pemberdayaan. Policy brief ini merekomendasikan integrasi pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dengan kebijakan daerah untuk menggeser paradigma dari ketergantungan bantuan menuju kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.

KONTEKS PERMASALAHAN

Kemiskinan Multidimensional yang Kompleks

Kemiskinan di Kabupaten Muara Enim bukan sekadar persoalan pendapatan rendah, melainkan fenomena multidimensional yang saling terkait. Dari dimensi ekonomi, situasinya cukup memprihatinkan dimana 43,3% rumah tangga hanya memiliki pendapatan di bawah Rp1 juta per bulan, yang berarti mereka hidup dalam kondisi kemiskinan atau bahkan kemiskinan ekstrem mengingat ukuran keluarga rata-rata. Lebih parah lagi, 60,9% rumah tangga tidak memiliki aset produktif apapun, baik berupa lahan pertanian, ternak, maupun peralatan usaha. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dan tidak memiliki jaring pengaman ketika menghadapi krisis.

Dimensi material menambah kompleksitas permasalahan. Data menunjukkan bahwa 31,3% rumah tangga mengalami ketidakcukupan pangan dengan berbagai tingkat

keparahan, dimana 1,9% bahkan hampir setiap hari harus mengurangi porsi makan karena keterbatasan sumber daya. Masalah sanitasi juga serius, dengan 20,1% rumah tangga tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan 8,6% masih melakukan buang air besar sembarangan. Kondisi perumahan pun memprihatinkan, dimana 73,8% rumah tangga tinggal di rumah berukuran 50 meter persegi atau kurang, dengan 27,3% hanya memiliki satu kamar untuk seluruh anggota keluarga.

Dari dimensi spasial, kesenjangan infrastruktur menjadi kendala signifikan. Meskipun 68,9% responden menyatakan kondisi jalan beraspal baik, masih ada 17,1% yang menghadapi jalan beraspal rusak, 10,1% hanya memiliki akses jalan setapak, dan 3,9% jalan tanah atau kerikil. Kerentanan terhadap bencana juga tinggi, dimana 22,6% responden pernah terdampak bencana dalam lima tahun terakhir, terutama banjir dan kekeringan yang secara langsung mempengaruhi mata pencaharian mereka di sektor pertanian.

Dimensi politik dan partisipasi menunjukkan marginalisasi yang nyata. Sebanyak 36,6% responden merasa pendapat mereka tidak pernah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas, sementara partisipasi dalam forum perencanaan pembangunan seperti musrenbang sangat rendah. Hal ini menciptakan siklus dimana kebijakan dan program tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat karena mereka tidak terlibat dalam proses perumusannya.

Aspek psikososial tidak kalah penting. Kemiskinan menciptakan beban mental yang berat, dimana 74,2% responden mengalami stres karena masalah keuangan dengan berbagai tingkat intensitas. Lebih dari 20% kadang-kadang atau sering merasa malu dengan kondisi ekonomi mereka, dan sebagian merasa dikucilkan karena status ekonomi. Kondisi psikologis ini menghambat kemampuan mereka untuk mengambil keputusan strategis dan memanfaatkan peluang ekonomi.

Yang paling mengkhawatirkan adalah persistensi kemiskinan antargenerasi. Data mengungkapkan bahwa 27,7% rumah tangga telah berada dalam kemiskinan selama lebih dari 10 tahun, sementara 20,3% mengaku miskin sejak lahir, menandakan kemiskinan yang diwariskan lintas generasi. Tanpa intervensi yang tepat, anak-anak dari keluarga ini akan tumbuh dengan keterbatasan gizi, pendidikan, dan keterampilan yang sama, melanggengkan siklus kemiskinan.

Kesenjangan antara Kebijakan dan Implementasi

Analisis terhadap dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2021-2025 menunjukkan bahwa secara normatif, pemerintah daerah telah merancang pendekatan yang komprehensif dan multisektoral. Dokumen tersebut mencakup lebih dari 20 urusan pemerintahan, dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, hingga pemberdayaan perempuan dan kepariwisataan. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan juga tidak hanya bersifat karitatif, tetapi mencakup pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin.

Namun realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Implementasi masih sangat didominasi oleh program bantuan konsumtif. PKH (Program Keluarga Harapan) disebutkan 57 kali oleh responden sebagai bantuan yang paling banyak diterima, diikuti BPNT (39 kali), bantuan beras (37 kali), dan BLT (22 kali). Sementara program yang bersifat produktif seperti pelatihan keterampilan, dukungan

modal usaha, atau penguatan aset warga hampir tidak menonjol dalam pengalaman masyarakat.

Lebih memprihatinkan lagi, 70,7% responden menyatakan bahwa bantuan yang diterima tidak signifikan dalam meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Ini mengindikasikan bahwa bantuan tersebut hanya berfungsi sebagai penyangga konsumsi jangka pendek, bukan sebagai stimulus untuk keluar dari kemiskinan. Ketergantungan pada bantuan juga terlihat dari fakta bahwa 14,8% rumah tangga menyebutkan bantuan pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan mereka.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program juga masih sangat terbatas. Meskipun 39,1% responden menyatakan warga dilibatkan, tidak ada penjelasan yang jelas tentang bentuk keterlibatan tersebut. Sementara 27,7% secara eksplisit menyatakan tidak dilibatkan, dan mayoritas merasa hanya menjadi penerima pasif bantuan, bukan subjek aktif yang diberdayakan. Hal ini menciptakan masalah dalam targeting program dan relevansi dengan kebutuhan lokal.

TEMUAN KUNCI

Aset Komunitas yang Belum Teroptimasi

Salah satu temuan paling penting dari kajian ini adalah bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Muara Enim sebenarnya memiliki beragam aset yang dapat menjadi modal pembangunan, namun belum diidentifikasi dan dimanfaatkan secara sistematis. Pendekatan ABCD mengidentifikasi enam kategori aset yang tersedia di tingkat komunitas.

Pertama, aset asosiasi dan kelompok menunjukkan struktur organisasi yang cukup kuat. PKK disebutkan 147 kali oleh responden, Karang Taruna 127 kali, kelompok keagamaan 107 kali, dan kelompok tani 90 kali. Arisan sebagai bentuk modal sosial tradisional juga masih aktif, disebutkan 69 kali. Keberadaan kelompok-kelompok ini menandakan bahwa jaringan sosial dan solidaritas kolektif masih hidup di masyarakat. Namun paradoksnya, 93,4% responden menyatakan tidak tergabung aktif dalam organisasi atau kelompok di lingkungannya. Ini berarti kelompok-kelompok tersebut eksis secara struktural tetapi tidak fungsional, atau hanya melibatkan segelintir orang. Lebih jauh, kegiatan kelompok masih didominasi oleh aktivitas keagamaan dan sosial, sementara kegiatan ekonomi produktif sangat minim.

Kedua, aset budaya masih memiliki kekuatan yang signifikan. Bahasa daerah disebutkan 146 kali sebagai tradisi yang masih dilestarikan, sementara upacara adat 111 kali. Nilai gotong royong juga masih kuat, dimana 39,1% responden menyatakan warga selalu saling membantu dalam kegiatan kemasyarakatan. Namun kelemahannya adalah minimnya tokoh budaya dan kegiatan budaya yang terlembaga. Hanya 12,9% yang memiliki keterampilan di bidang budaya atau tradisi lokal, dan 91,8% menyatakan komunitasnya tidak memiliki kelompok seni atau budaya. Yang lebih penting, budaya belum terintegrasi dengan ekonomi atau pendidikan, sehingga potensinya sebagai modal pembangunan belum tergali.

Ketiga, aset lembaga lokal menunjukkan ketersediaan infrastruktur kelembagaan yang memadai. Masjid disebutkan 208 kali, sekolah 170 kali, dan kantor pemerintahan 159 kali. Keberadaan lembaga-lembaga ini seharusnya dapat menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Namun tingkat partisipasi masyarakat dalam lembaga-

lembaga tersebut sangat rendah, hanya 17,9% yang terlibat aktif. Peran ekonomi dan literasi dari lembaga-lembaga ini juga belum maksimal, masih terbatas pada fungsi-fungsi konvensional seperti peribadatan, pendidikan formal, dan administrasi.

Keempat, aset individu berupa keterampilan menunjukkan dominasi yang kuat di sektor agraris. Pengalaman atau keahlian di bidang pertanian dan perkebunan disebutkan 191 kali, jauh melampaui bidang lainnya. Ini merupakan kekuatan yang bisa dioptimalkan, namun juga menunjukkan kurangnya diversifikasi keterampilan. Yang mengkhawatirkan adalah 89,1% responden menyatakan tidak memiliki hobi atau aktivitas kreatif yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan produktif, dan 96,9% tidak pernah mengikuti pelatihan keterampilan apapun. Minimnya akses pelatihan ini membuat potensi individu tidak berkembang.

Kelima, aset ekonomi lokal menunjukkan adanya dinamika usaha meskipun masih terbatas. UMKM dan perdagangan kecil cukup aktif, disebutkan 145 kali sebagai kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan masyarakat. Sektor jasa dan kuliner juga berkembang, masing-masing disebutkan 88 dan 85 kali. Namun hanya 11,3% responden yang memiliki usaha sendiri, menandakan rendahnya tingkat kewirausahaan. Lebih jauh, 82% tidak tertarik untuk memulai usaha berbasis komunitas, dan 214 responden menyatakan tidak ada atau tidak tahu mengenai kerjasama ekonomi antar warga. Ini menunjukkan ekonomi lokal masih sangat individualistik tanpa dukungan kelembagaan kolektif.

Keenam, aset fisik dan alam menunjukkan ketersediaan infrastruktur sosial yang baik, namun lemah di infrastruktur ekonomi. Rumah ibadah, balai desa, dan gedung serbaguna banyak disebutkan, sementara pasar dan pusat kerajinan hampir tidak ada. Dari sisi sumber daya alam, karet mendominasi sebagai komoditas utama (disebutkan 78 kali), diikuti batubara (27 kali) dan air (24 kali). Ketergantungan pada satu komoditas membuat masyarakat sangat rentan terhadap fluktuasi harga, sementara diversifikasi belum terjadi secara signifikan.

Aspirasi Masyarakat untuk Pemberdayaan

Data tentang harapan masyarakat memberikan petunjuk penting tentang arah kebijakan yang diinginkan. Penciptaan lapangan kerja menempati prioritas tertinggi, disebutkan oleh 35% responden. Ini bukan sekadar permintaan akan pekerjaan baru, tetapi tuntutan agar tenaga kerja lokal mendapatkan prioritas dalam rekrutmen, terutama di sektor industri dan perkebunan yang beroperasi di wilayah mereka. Aspirasi ini menegaskan bahwa masalah utama adalah keterbatasan akses terhadap penghasilan tetap dan layak.

Modal usaha menempati prioritas kedua (19,5%), menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sebenarnya ingin mandiri secara ekonomi tetapi terkendala permodalan. Ini sejalan dengan temuan bahwa 94,9% rumah tangga tidak memiliki tabungan dan sangat bergantung pada pinjaman informal. Sementara permintaan terhadap bantuan sosial masih tinggi (17,6%), khususnya untuk kelompok rentan seperti lansia dan janda, menandakan bahwa jaring pengaman sosial tetap diperlukan untuk kelompok yang tidak mampu bekerja produktif.

Yang menarik adalah 9,8% responden menyoroti masalah keadilan dalam distribusi bantuan, menganggap bahwa sistem tidak adil atau tidak berdasarkan data akurat. Ini mencerminkan krisis kepercayaan terhadap tata kelola program. Stabilisasi

harga komoditas dan kebutuhan pokok juga menjadi keresahan (7,8%), terutama terkait fluktuasi harga karet yang sangat mempengaruhi pendapatan rumah tangga petani.

Aspirasi terhadap pendidikan (3,9%) dan pelatihan keterampilan (9,8%) menunjukkan kesadaran akan pentingnya investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Meskipun persentasenya tidak terlalu tinggi, ini menandakan bahwa ada segmen masyarakat yang menginginkan transformasi struktural, bukan sekadar bantuan jangka pendek.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

A. Reformulasi Kebijakan: *Dari Bantuan Konsumtif ke Pemberdayaan Produktif*

Urgensi reformulasi kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dirumuskan dalam tiga poin fundamental. Pertama, perlu ada reposisi fokus kebijakan dari dominasi bantuan konsumtif menuju program produktif dan transformatif yang menekankan kemandirian ekonomi masyarakat. Ini tidak berarti menghilangkan bantuan sosial sama sekali, tetapi mengintegrasikannya dengan strategi pemberdayaan. Bantuan tunai seperti PKH dan BLT seharusnya dilengkapi dengan exit strategy yang jelas, dimana penerima bantuan didampingi untuk mengembangkan sumber pendapatan produktif sehingga dalam jangka waktu tertentu dapat mandiri.

Kedua, penguatan tata kelola data dan partisipasi masyarakat menjadi prasyarat untuk memastikan program tepat sasaran, inklusif, serta sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Fenomena dimana sebagian responden menerima lebih dari satu jenis bantuan sementara yang lain tidak menerima apapun menunjukkan kelemahan dalam sistem targeting. Pemerintah daerah perlu membentuk Registri Sosial Muara Enim yang menyatukan DTKS dengan verifikasi berbasis komunitas, dilengkapi dengan mekanisme validasi partisipatif melalui musyawarah dusun setiap semester.

Ketiga, penciptaan ekosistem keberdayaan yang berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja, dukungan modal usaha, pelatihan keterampilan, kebijakan stabilisasi harga komoditas, dan diversifikasi sumber pendapatan. Ini memerlukan kemitraan strategis dengan sektor swasta, khususnya perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di wilayah tersebut, melalui MoU yang mengikat tentang serapan tenaga kerja lokal, pengadaan lokal untuk kebutuhan operasional perusahaan, dan CSR yang produktif.

B. Strategi Bertahap Berbasis Prioritas Aset

Implementasi pendekatan ABCD memerlukan strategi yang bertahap dan realistis, mengingat keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan. Berdasarkan analisis keterhubungan aset dengan berbagai dimensi masalah, aset asosiasi dan kelompok menjadi prioritas utama karena terhubung dengan seluruh dimensi kemiskinan, diikuti aset budaya dan lembaga lokal, kemudian aset individu, dan terakhir aset ekonomi lokal. Aset fisik dan alam, meskipun penting, memerlukan investasi besar dan intervensi struktural yang tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan komunitas.

Jangka Pendek (1-2 Tahun): Mobilisasi Cepat dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pada tahap awal, fokus diarahkan pada mobilisasi aset asosiasi yang sudah ada. Kelompok-kelompok seperti PKK, karang taruna, kelompok tani, arisan, dan forum RT/RW yang sudah eksis perlu direvitalisasi fungsinya. Koperasi desa dan kelompok simpan pinjam yang ada perlu diperkuat untuk menyediakan akses modal mikro yang aman dan terjangkau, menggantikan ketergantungan pada pinjaman informal yang sering merugikan. Target konkretnya adalah membentuk minimal satu kelompok simpan pinjam aktif di setiap desa dalam tahun pertama, dengan modal awal dari dana desa yang dikombinasikan dengan skema pendampingan.

Gerakan gotong royong, yang masih kuat di masyarakat, dapat dimobilisasi untuk pembangunan sanitasi, rumah layak, dan penyediaan air bersih. Ini tidak hanya menyelesaikan masalah infrastruktur dasar, tetapi juga memperkuat modal sosial. Forum RT/RW perlu difungsikan sebagai pusat informasi bantuan dan musyawarah warga, dengan sistem papan pengumuman atau grup digital yang memastikan transparansi.

Aset budaya juga perlu diaktifkan untuk memperkuat kohesi sosial. Kegiatan seni dan budaya inklusif dapat mengurangi rasa malu, stigma, dan isolasi sosial yang sering dialami kelompok miskin. Revitalisasi adat dan budaya gotong royong tidak hanya untuk ritual, tetapi sebagai instrumen konkret untuk pembangunan fisik seperti perbaikan jalan dan fasilitas dasar melalui sistem kerja bakti yang terorganisir.

Dari sisi lembaga lokal, pemerintah desa perlu melakukan pemetaan warga miskin berbasis komunitas untuk memastikan data lebih akurat. Lembaga adat, yang masih memiliki legitimasi di beberapa desa, dapat dilibatkan dalam distribusi bantuan untuk memastikan transparansi dan keadilan, mengurangi kecurigaan tentang favoritisme atau manipulasi data.

Jangka Menengah (3-5 Tahun): Penguatan Ekonomi Produktif dan Mobilitas Sosial

Setelah fondasi sosial terbentuk, fokus beralih pada penguatan ekonomi produktif. Aset ekonomi lokal berupa UMKM, pasar desa, dan jaringan pedagang menjadi kunci. Pemerintah daerah perlu menyediakan program pendampingan UMKM yang komprehensif, bukan sekadar pelatihan sesaat, tetapi coaching berkelanjutan dalam manajemen usaha, pembukuan sederhana, dan strategi pemasaran. Digitalisasi UMKM juga perlu didorong, dengan pelatihan penggunaan platform e-commerce dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar.

Infrastruktur pasar lokal perlu diperbaiki untuk meningkatkan aksesibilitas produk. Ini termasuk pembangunan atau renovasi pasar desa, penyediaan kios dengan biaya terjangkau, dan pengaturan hari pasar yang terkoordinasi. Insentif untuk usaha mikro berbasis keluarga dapat diberikan dalam bentuk keringanan pajak daerah, akses prioritas ke program CSR perusahaan, atau subsidi untuk peralatan produksi.

Lembaga lokal difokuskan untuk mendukung pendidikan dan pelatihan agar tercipta mobilitas sosial. Program pelatihan vokasi untuk generasi muda perlu diselaraskan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, bukan hanya keterampilan generik. Kerjasama dengan perusahaan tambang dan perkebunan dapat menciptakan skema magang dengan jaminan penempatan kerja bagi yang lulus dengan baik. Beasiswa untuk

keluarga miskin tidak hanya untuk biaya sekolah, tetapi juga untuk biaya hidup sehingga anak tidak terpaksa putus sekolah untuk membantu ekonomi keluarga.

Aset asosiasi dan budaya tetap diberdayakan dengan mengembangkan forum musyawarah partisipatif yang benar-benar inklusif, bukan hanya ritual formal. Majelis taklim dan arisan dapat diperkuat perannya sebagai ruang sosial-ekonomi, dimana diskusi tentang pengelolaan keuangan rumah tangga, peluang usaha, dan dukungan antar anggota menjadi agenda rutin.

Jangka Panjang (Lebih dari 5 Tahun): Memutus Rantai Kemiskinan Antargenerasi

Pada tahap ini, strategi diarahkan pada transformasi struktural yang memastikan kemiskinan tidak diwariskan ke generasi berikutnya. Aset lembaga lokal dan individu, seperti sekolah, tokoh masyarakat, dan keluarga, menjadi prioritas. Peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kualitas pengajaran, ketersediaan buku, dan program pendampingan belajar untuk anak dari keluarga miskin yang sering tertinggal.

Layanan kesehatan anak perlu ditingkatkan dengan fokus pada pencegahan stunting dan pemeriksaan rutin tumbuh kembang. Program pemberian makanan tambahan di sekolah dapat memastikan anak mendapat nutrisi yang cukup meskipun kondisi ekonomi keluarga terbatas. Transfer keterampilan lintas generasi perlu difasilitasi, dimana para perajin, petani sukses, atau pengusaha lokal berbagi pengetahuan praktis kepada generasi muda melalui sistem mentoring informal yang didukung pemerintah desa.

Tokoh masyarakat perlu diberdayakan sebagai agen perubahan jangka panjang. Program capacity building untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepala dusun dapat membekali mereka dengan pemahaman tentang pembangunan berbasis aset, kepemimpinan transformatif, dan strategi advokasi kebijakan. Mereka dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan program pemerintah, sekaligus pengawas sosial yang memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Aset budaya dan asosiasi perlu diinstitusionalisasikan dalam tata kelola desa. Nilai gotong royong tidak hanya menjadi tradisi lisan, tetapi dituangkan dalam regulasi desa tentang sistem kerja bakti, bantuan antar warga, dan mekanisme solidaritas sosial. Integrasi kearifan lokal dalam mitigasi bencana dan adaptasi iklim menjadi penting, mengingat kerentanan wilayah terhadap banjir dan kekeringan. Pengetahuan tradisional tentang pola musim, sistem peringatan dini berbasis alam, dan strategi bertahan hidup perlu didokumentasikan dan diajarkan kepada generasi muda.

C. Integrasi Abcd Dengan Kebijakan Daerah: *Mekanisme Operasional*

Integrasi pendekatan ABCD dengan kebijakan daerah memerlukan mekanisme operasional yang jelas pada setiap tahapan. Pada tahap identifikasi dan pemetaan aset, komunitas berperan aktif melakukan inventarisasi sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya manusia, keahlian individu, jaringan sosial, kelembagaan lokal, lahan, UMKM, tradisi, hingga pengetahuan lokal. Pemetaan ini dapat dilakukan melalui workshop partisipatif yang difasilitasi oleh pendamping desa, menggunakan alat bantu visual seperti peta komunitas dan tabel aset. Pemerintah daerah mendukung proses ini dengan menyediakan pendampingan teknis, mengembangkan basis data terintegrasi

yang menggabungkan DTKS dengan data komunitas hasil pemetaan, serta mengeluarkan regulasi yang memastikan pemetaan aset menjadi bagian wajib dari proses Musrenbangdes dan Musrenbangda.

Pada tahap formulasi kebijakan dan program, komunitas menyampaikan aspirasi dan prioritas mereka berdasarkan hasil pemetaan aset melalui forum-forum partisipatif yang tidak hanya bersifat seremonial. Forum ini harus memastikan keterwakilan kelompok rentan seperti perempuan, lansia, pemuda, dan keluarga miskin ekstrem. Pemerintah daerah kemudian mengintegrasikan hasil tersebut ke dalam dokumen perencanaan resmi seperti RPJMD, Renstra OPD, dan program tematik. Ini berarti RPJMD periode berikutnya harus secara eksplisit memasukkan roadmap implementasi ABCD, bukan sekadar menyebutkan pemberdayaan masyarakat secara umum.

Pada tahap implementasi kolaboratif, komunitas menggerakkan aset yang telah terpetakan untuk mendukung program. Misalnya, kelompok tani memanfaatkan lahan kolektif untuk pertanian organik yang hasilnya dijual melalui koperasi, kelompok perempuan mengelola koperasi simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng, atau pemuda mengembangkan platform digital untuk pemasaran produk lokal. Pemerintah daerah memastikan keberlangsungan implementasi melalui dukungan anggaran yang fleksibel, bukan hanya bantuan barang atau uang tunai tetapi juga fasilitasi akses pasar melalui pameran produk lokal, penyediaan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kelompok, serta membangun kemitraan dengan sektor swasta dan NGO yang kredibel.

Pada tahap kelembagaan dan tata kelola, komunitas membentuk organisasi swadaya, BUMDes, koperasi, maupun forum lintas komunitas untuk mengelola aset secara berkelanjutan. Pembentukan ini harus disertai dengan pelatihan manajemen organisasi, pembukuan keuangan, dan tata kelola yang baik agar tidak mengulang kegagalan kelembagaan di masa lalu. Pemerintah daerah memperkuatnya dengan membangun tata kelola kolaboratif, misalnya melalui revitalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang melibatkan berbagai pihak termasuk perwakilan komunitas, akademisi, dan sektor swasta. Yang penting adalah memastikan inklusivitas, dimana kelompok rentan memiliki suara dalam struktur pengambilan keputusan.

Pada tahap monitoring dan evaluasi partisipatif, komunitas memberikan umpan balik secara langsung terhadap pelaksanaan program melalui mekanisme yang terstruktur, seperti rapat evaluasi triwulanan di tingkat desa, penggunaan kartu skor komunitas, atau platform digital sederhana untuk pelaporan masalah. Mereka juga melaporkan perkembangan aset yang berhasil dimobilisasi, baik keberhasilan maupun kegagalan, sebagai pembelajaran bersama. Pemerintah daerah menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk menyesuaikan kebijakan secara adaptif, mendorong replikasi praktik baik ke desa atau kelompok lain, dan melakukan scaling up terhadap aset yang terbukti paling produktif dan berpengaruh melalui alokasi anggaran yang lebih besar atau dukungan regulasi yang lebih kuat.

D. Pendanaan Inovatif: *Blended Finance* untuk Pemberdayaan

Pengentasan kemiskinan berbasis ABCD memerlukan dukungan pendanaan yang memadai namun juga inovatif. Pemerintah daerah perlu mengembangkan skema

blended finance yang menggabungkan berbagai sumber pendanaan. APBD tetap menjadi tulang punggung, tetapi perlu dialokasikan lebih strategis untuk program pemberdayaan produktif, bukan hanya bantuan konsumtif. Dana desa dapat dioptimalkan untuk program berbasis aset komunitas, mengingat kewenangan desa yang cukup luas dalam pengelolaan dana tersebut.

CSR perusahaan, khususnya perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim, perlu diarahkan lebih produktif. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan MoU baku yang mengatur kontribusi perusahaan, bukan hanya dalam bentuk bantuan barang tetapi juga serapan tenaga kerja lokal dengan kuota minimal, pengadaan lokal untuk kebutuhan operasional perusahaan seperti katering dan laundry, serta dukungan untuk program WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) dan infrastruktur produktif seperti balai latihan kerja atau pusat inkubasi usaha.

Sumber pendanaan berbasis agama seperti zakat dan wakaf produktif juga memiliki potensi besar namun belum terkelola optimal. Baznas dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyalurkan zakat dalam bentuk bantuan modal usaha, beasiswa pendidikan vokasi, atau program kesehatan preventif. Wakaf produktif dapat digunakan untuk membangun aset komunitas seperti pasar desa, gedung pelatihan, atau lahan pertanian kolektif yang hasilnya untuk kesejahteraan bersama.

Filantropi dari alumni sukses atau perantau yang berhasil juga perlu dimobilisasi. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan yayasan atau trust fund yang mengelola sumbangan untuk program pemberdayaan jangka panjang, bukan sekadar bantuan insidental. Mekanisme akuntabilitas partisipatif harus diterapkan untuk semua sumber pendanaan, dimana laporan penggunaan dana dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses masyarakat, serta ada mekanisme audit sosial yang melibatkan perwakilan komunitas.

PRASYARAT DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

Prasyarat Keberhasilan

Keberhasilan integrasi ABCD dengan kebijakan daerah memerlukan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, dari sisi regulasi, perlu ada revisi Peraturan Bupati untuk memasukkan substansi pengendalian bantuan sosial dengan exit strategy yang jelas, verifikasi dan validasi data penerima manfaat berbasis digital dengan melibatkan RT hingga pemerintah desa, dan penguatan pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan aset bersama dengan pelaku usaha. Roadmap implementasi ABCD perlu diintegrasikan secara eksplisit ke dalam RPJMD, Renstra OPD, dan RPJMDes sebagai dasar rekonstruksi program pembangunan daerah.

Kedua, dari sisi kelembagaan, perlu dibentuk forum penanggulangan kemiskinan yang melibatkan tidak hanya OPD terkait tetapi juga perusahaan tambang dan perkebunan, perguruan tinggi, dan perwakilan komunitas, yang bertemu minimal dua kali setahun untuk evaluasi dan koordinasi. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) perlu direvitalisasi dengan penambahan unsur komunitas dan sektor swasta, dilengkapi dengan sekretariat yang permanen dan sistem monitoring yang terdigitalisasi.

Ketiga, dari sisi pendanaan, perlu dibentuk Dana Inovasi Pemberdayaan Komunitas di tingkat daerah yang secara khusus membiayai program berbasis aset yang dikelola langsung oleh komunitas. Dana ini dapat bersumber dari alokasi khusus APBD, dana desa yang dikoordinasikan, dan kontribusi CSR yang terkonsolidasi. Mekanisme pencairan harus sederhana dan tidak birokratis, dengan proposal yang singkat dan penilaian yang partisipatif melibatkan perwakilan komunitas.

Keempat, dari sisi kapasitas, perlu ada program pelatihan intensif untuk perangkat desa, pendamping PKH, kader PKK, dan tokoh masyarakat tentang pemetaan aset, perencanaan partisipatif, dan kewirausahaan sosial. Pelatihan tidak hanya dalam bentuk workshop sesaat, tetapi pendampingan berkelanjutan dengan sistem mentoring. Perguruan tinggi dapat dilibatkan untuk menyediakan pendampingan berbasis riset, dimana mahasiswa melakukan kerja lapangan sambil membantu masyarakat mengidentifikasi dan mengembangkan aset mereka.

Kelima, dari sisi kemitraan, perlu ada MoU dengan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim yang mengatur secara detail tentang serapan tenaga kerja lokal dengan target kuota minimal dan mekanisme job matching triwulanan di balai desa, pengadaan lokal dengan porsi minimal untuk UMKM desa, CSR produktif yang fokus pada infrastruktur WASH dan penguatan kapasitas bukan bantuan insidental, serta KPI dan audit sosial dengan laporan kuartalan dan rapat evaluasi yang melibatkan masyarakat. Perlu ada sistem One Stop Service di tingkat kabupaten agar desa tidak bernegosiasi sendiri-sendiri dengan perusahaan, yang sering menimbulkan kompetisi tidak sehat dan hasil yang tidak optimal.

Tantangan yang Harus Diantisipasi

Implementasi strategi ini tidak akan mulus dan akan menghadapi sejumlah tantangan yang harus diantisipasi sejak awal. Pertama, eksklusi sosial dan diskriminasi masih menjadi masalah riil meskipun tidak dialami mayoritas. Ada kelompok yang terpinggirkan karena status ekonomi, usia, maupun gender, dan diskriminasi ini terjadi dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, hingga ekonomi dan pangan. Kebijakan perlu menghadirkan mekanisme afirmasi khusus untuk kelompok rentan, seperti kuota dalam program pelatihan atau akses prioritas untuk bantuan modal usaha.

Kedua, keterbatasan akses pekerjaan dan pendapatan layak tetap menjadi kendala struktural. Mayoritas responden menekankan sulitnya memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak, minimnya keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar, serta lapangan kerja yang terbatas. Ketidakstabilan pendapatan membuat masyarakat sulit keluar dari jerat kemiskinan meskipun ada program pemberdayaan. Ini memerlukan intervensi yang lebih besar dari pemerintah daerah dalam penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya, pengembangan kawasan industri kecil, atau skema insentif untuk investasi yang menyerap tenaga kerja lokal.

Ketiga, keterbatasan modal dan aset produktif pada sebagian besar rumah tangga miskin membuat mereka sulit memulai atau mengembangkan usaha mandiri bahkan ketika ada keinginan dan keterampilan. Program kredit mikro sering terhambat oleh ketiadaan agunan atau riwayat kredit yang buruk. Perlu ada skema khusus seperti dana

bergulir berbasis kepercayaan komunitas (tanggung renteng), atau hibah aset produktif seperti ternak atau peralatan usaha dengan sistem profit sharing.

Keempat, ketergantungan pada bantuan sosial yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun tidak mudah diubah. Sebagian masyarakat sudah terbiasa menerima bantuan dan mungkin akan resisten terhadap perubahan paradigma yang menuntut mereka lebih aktif. Perlu ada strategi komunikasi dan edukasi yang intensif untuk mengubah mindset, serta pendampingan psikososial untuk membangun kepercayaan diri dan motivasi mereka.

Kelima, beban biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi tetap menjadi penghambat bahkan ketika ada program pemberdayaan. Keluarga miskin sering terpaksa memilih antara investasi pendidikan anak atau pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari. Program beasiswa dan jaminan kesehatan harus dipastikan benar-benar meringankan beban ini, bukan hanya simbolik.

Keenam, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar membuat banyak program pelatihan tidak efektif karena peserta tidak memiliki fondasi yang cukup atau pelatihan tidak menghasilkan keterampilan yang dibutuhkan pemberi kerja. Perlu ada assessment awal untuk memahami kemampuan dasar peserta dan desain kurikulum pelatihan yang benar-benar berbasis kebutuhan pasar, melibatkan perusahaan atau pelaku usaha dalam penyusunan kurikulum dan bahkan pelaksanaan pelatihan.

KESIMPULAN

Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Muara Enim memerlukan perubahan paradigma yang fundamental dari pendekatan berbasis bantuan menuju pendekatan berbasis pemberdayaan. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun program bantuan sosial membantu memenuhi kebutuhan dasar jangka pendek, lebih dari 70% penerima bantuan merasakan bahwa hal tersebut tidak signifikan meningkatkan kondisi ekonomi mereka secara berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat memiliki beragam aset yang belum dioptimalkan, mulai dari kelompok sosial yang aktif, nilai gotong royong yang masih kuat, keterampilan agraris yang solid, hingga lembaga lokal yang tersedia.

Integrasi pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dengan kebijakan daerah menawarkan jalan keluar yang realistis dan berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi, memobilisasi, dan mengembangkan aset komunitas yang sudah ada, kemudian memperkuatnya melalui dukungan kebijakan daerah yang responsif, partisipatif, dan berbasis data, pengentasan kemiskinan dapat bergerak dari sekadar mengurangi angka statistik menuju membangun kemandirian ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat.

Strategi yang direkomendasikan bersifat bertahap dan realistis, dimulai dari mobilisasi cepat aset sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam 1-2 tahun pertama, berlanjut pada penguatan ekonomi produktif dan mobilitas sosial dalam 3-5 tahun, hingga mencapai pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi dalam jangka panjang lebih dari 5 tahun. Dengan dukungan regulasi yang tepat, kelembagaan yang kuat, pendanaan inovatif, peningkatan kapasitas, dan kemitraan strategis, target

menurunkan angka kemiskinan ekstrem mendekati nol persen dan meningkatkan kemandirian ekonomi komunitas dalam 5 tahun ke depan adalah realistis untuk dicapai.

Namun keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, dan kesediaan semua pihak untuk berkolaborasi melampaui kepentingan sektoral. Kemiskinan adalah masalah bersama yang memerlukan solusi bersama, dan pendekatan berbasis aset komunitas memberikan fondasi yang kokoh untuk membangun solusi tersebut dari dalam, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri.